

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Mawar Nomor 8 Telepon (061) 7952370

Website : bpka.deliserdang.go.id

E-mail : bkadsekretariatds@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tatanan, instrument, metode pertanggungjawaban meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengukuran dan Pelaporan dengan bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan Visi dan Misi Organisasi / Pemerintah Daerah.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah bahwa Penyelenggara Pemerintahan diharuskan membuat laporan akuntabilitas kinerjanya dimulai dari proses penepatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam perjanjian Kinerja untuk memperbaiki Kinerja Organisasi / atau mempertahankan kinerja jika berhasil pada periode berikutnya. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu dokumen LKIP ini dibuat untuk

mengetahui Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menyajikan realisasi pelaksanaan selama tahun 2022 secara terukur.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pada periode berikutnya ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Kami harapkan melalui laporan ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan sekaligus kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta kami berharap dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinekaan.



Lubuk Pakam, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH
PEMBINA

NIP. 19730721 199503 1 003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
2.2.1 Anggaran.....	9
1.3. DASAR HUKUM	9
1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III	23
LAPORAN KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	24
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	24
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	27
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	33
3.2	Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV	45
PENUTUP	45





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *Good Governance*, dimana sistem pengelolaan Pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini juga ditekankan bahwa Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Deli Serdang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah :

- a. Sebagai Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dengan program prioritas Kepala Daerah;
- b. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;



- c. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Priode yang akan datang, serta penyempurnaan bagi Kebijakan yang diperlukan.

Seturut dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yaitu **"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"** dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi untuk mendukung pada misi ke-5 (lima) yaitu **"Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah untuk mewujudkan Tata Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab"** dengan tujuan **"Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel"** yang memiliki Sasaran yaitu meningkatnya efektifitas dan akuntabelitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Sasaran Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan atau dengan sebutan "BPK" dapat memberikan empat jenis opini, yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion)**, **Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion)**, **Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion)** dan **Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion)**. Kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sistem pengendalian Internal memadai dan tidak ada salah saji. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pelaporan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).



Dalam mencapai Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam pencapaiannya, sehingga kewajaran dalam memberikan Informasi Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut ini adalah penjelasan umum Organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Secara kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipologi A.



Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan

Tugas Pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pembinaan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup sekretariat.

Fungsi :

- Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- Pelaksanaan tugas sekretariat Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
- Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.



- **Kepala Sub Bagian Umum**
Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.
- **Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional**
 - Analis Kebijakan ahli muda
 - Analis Perencana
- c. **Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.**
Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- **Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran**
Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- **Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran**
Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. **Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.**
Tugas Pokok membantu kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah.



Fungsi :

- **Penyiapan** bahan perumusan kebijakan Bidang Perbendaharaan Daerah;
- **Penyiapan** bahan koordinasi Bidang Perbendaharaan Daerah;
- **Pelaksanaan** monitoring dan evaluasi Bidang Perbendaharaan Daerah.

• **Sub Bidang Gaji**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Gaji.

• **Sub Bidang Kas Daerah**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Kas Daerah.

e. **Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Fungsi :

- **Penyiapan** bahan perumusan kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- **Penyampaian** bahan koordinasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- **Pelaksanaan** monitoring dan evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

• **Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.



• **Kepala Sub Bidang Pembukuan**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pembukuan.

f. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

• **Kepala Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Milik Daerah**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Barang Milik Daerah.

• **Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Deli Serdang dapat dilihat gambar di bawah ini :

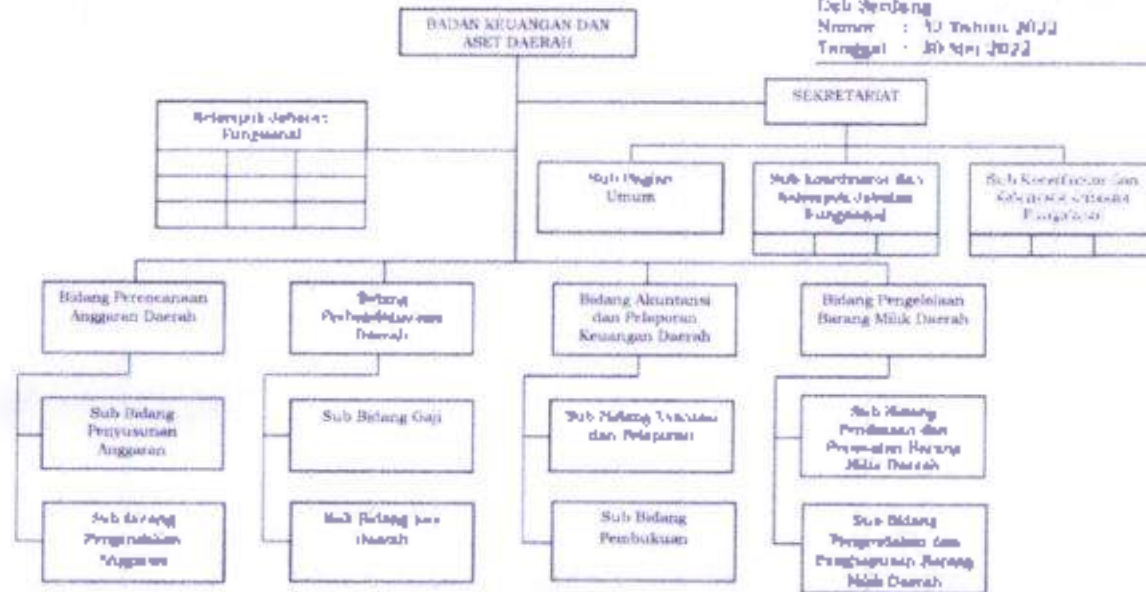


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran 1

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 30 Mei 2022



Ditandatangani di Lokasi Penerimaan pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

etd

DAWIENI SIBU

Beasiswa Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor : 02

Solusi sengketa dengan solusi
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIM SIREGAR, SH
NIK. 19960820 201003 1 0017

BUPATI DELI SERDANG

TM

AMMANI TAMBUKAN



2.2.1 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD	Tahun 2021	Rp. 665.961.437.819,00
APBD	Tahun 2022	Rp. 712.250.948.109,00
Sumber Lainnya (jika ada)	-	-

Sumber : Tahun 2022 Laporan Keuangan Audited dan Tahun 2022 Laporan Keuangan Unaudited

Dapat disampaikan bahwa pada tabel di atas adalah APBD Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 setelah Perubahan APBD yang dikelola pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

1.3. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pemebentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2) Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 15) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- 16) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 17) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam rencana strategis 2019-2024 disebutkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019-2024 adalah :

***“Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya
Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan”***

Dengan Misi :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.



3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan terkait pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-5 yaitu : *"Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab"*.

Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel"*. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Priode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun		
				2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100	100	100
2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	80 poin	81 poin
			2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 poin	74 poin	76 poin

Sumber : BA Revisi Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 (Hasil Revisi Tahun 2020)



Adapun Penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	Persentase	<p>Definisi 1 : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu apabila Laporan Keuangan dapat diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir (sesuai dengan permendagri 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);</p> <p>Definisi 2 : Persentase Penyusunan APBD yang tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman APBD 2022. bahwa Penyusunan dimaksud adalah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penyusunan APBD dan Perubahan APBD mulai dari Penyusunan RKPD sampai dengan Penetapan APBD melalui Peraturan Daerah dan Perkada tentang Penjabaran</p>	$\frac{\text{Jumlah Dokumen tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$	



					APBD/PAPBD disahkan Kedua definisi tersebut merupakan aspek dalam mencapai Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualan) oleh BPK, dengan kriteria : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Efektifitas Penilaian Internal/ Sistem Pengendalian Internal; 3. Kedudukan Peningkatan Informasi; dan 4. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholder dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		2.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi terhadap implementasi mulai dari perencanaan kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	



					baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024

2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut rencana Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	Persentase	100
2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	74

Sumber : BA Renja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk



melaksanakan Program, Kegiatan sampai Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perjanjian kinerja juga merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin
		Nilai LME AKIP Perangkat Daerah	74 poin

Sumber Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah :



Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	1 sub kegiatan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	4 sub kegiatan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	720 OR
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
I.2	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	2 sub kegiatan
1.	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 paket
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	8 sub kegiatan
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket



3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 paket
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	2 sub kegiatan
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 sub kegiatan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	4 sub kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu	100 persen



II.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	7 sub kegiatan
1.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	55 dokumen
2.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	55 dokumen
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	55 dokumen
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	55 dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen
7.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen
II.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	5 sub kegiatan
1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 laporan
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen
4.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen
5.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen



Pemerintah Daerah			
II.1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 sub kegiatan
1.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	380 laporan
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	380 laporan
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu	100 persen
III.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Sub Kegiatan
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen
2.	inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan
3.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	100 laporan
4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen
5.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022



BAB III LAPORAN KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100 %	Sangat tinggi	Opini WTP Tahun 2021
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	79 poin	100 %	Sangat Tinggi	Laporan IKM BKAD
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	74 poin	100 %	Sangat Tinggi	

Sumber: Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Hasil Opini BPK Tahun 2021



Jika dilihat dari tabel di atas, persentase capaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam kategori sangat tinggi atau 100 % (seratus persen). Dapat dijelaskan bahwa ketercapaian Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu adalah merupakan bagian mendukung tercapainya Opini WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dimana pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Opini WTP. Opini tersebut adalah merupakan salah satu tercapainya Misi Bupati Deli Serdang yaitu "Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab" dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta yang memiliki sasaran meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peraian opini WTP oleh BPK. Ketercapaian ini juga menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, persentase jumlah dokumen yang tepat waktu telah sesuai dengan target sehingga mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan mendapat opini WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*).

Pada Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan bahwa pada tahapan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD mulai dari penyusunan RKPD, Rancangan dan Penandatanganan KUA PPAS sampai dengan penetapan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 melalui penetapan Peraturan Daerah telah berjalan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan atau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Sedangkan Laporan Keuangan yang tepat waktu yang merupakan bagian dari Indikator Sasaran



Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah saat ini sedang pada proses pengerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya akan disampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.

Bila melihat dari Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah ada 2 (dua) indikator didalamnya diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah secara eksplisit tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat, namun pada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah lainnya tentu adanya andil yang dilakukan atau dilaksnakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APHD yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,14	86,33	79	79	100
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	62,64	74,92	74	74	100



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5 *100
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100 %	100%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	81 poin	97,53
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	78 poin	94,87

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 100 % , tingkat kemajuan tahun 2022 sudah mencapai 100%, namun hal ini harus dipertahankan sehingga pada akhir renstra tahun 2024 tetap tercapai dengan opini WTP oleh BPK RI.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 81 poin tingkat kemajuan tahun 2022 sudah mencapai 97,53 %.
 - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 78 poin tingkat kemajuan tahun 2022 sudah mencapai 94,87 %.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	Defisit Anggaran	Menyusun APBD dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
						Keterlambatan penandatanganan nota resepakelan antara Pemkab (Ekssekutif) dan DPRD (Legeslatif).	Membuat jadwal sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga komunikasi hubungan dengan baik.
						Cesalahan dalam pencatatan/ kebutuhan	Melakukan pendampingan kepada DPRD dalam penyusunan laporan keuangan DPRD dan Laporan BAKD DPRD dan melakukan Rekonsiliasi data pada emirasi akuntansi secara berkala setiap bulannya
						Penyempitan Laporan Kelangan tidak tepat waktu	Menyusun SOP, melakukan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset seluruh OPD serta membenarkan hibnguan melalui Surat Edaran
						Kesalahan dalam Penganggaran	Melakukan asistensi dokumen penganggaran serta melakukan koordinasi dengan Kamernarian/ Lembaga dan juga dengan melaksanakan bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan operator penyusun anggaran.



2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	79 poin	100%	Transparansi Program dan Penganggaran	Meningkatkan sarana media informasi secara elektronik sehingga tercapainya Anggaran yang Transparan dan Akuntabel
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	74 poin	100%		Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hal yang mempengaruhi keberhasilan dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi dalam 5 (lima) hal yaitu :
 - a. Defisit Anggaran, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bila tidak tersusun dengan baik dan terencana maka defisit anggaran dapat terjadi untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengantisipasi kondisi ini melakukan koordinasi yang kuat kepada Perangkat Daerah lainnya khususnya yang tergabung pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam Penyusunan Anggaran dimaksud juga mempertimbangkan realisasi APBD tahun sebelumnya.
 - b. Keterlambatan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab (Eksekutif) dan DPRD (Legeslatif), pada kondisi ini juga sangat mempengaruhi ketercapaian sasaran strategis sehingga diperlukan langkah untuk mengantisipasinya yaitu dengan membuat jadwal sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga komunikasi hubungan baik dengan legeslatif.
 - c. Kesalahan dalam pencatatan/ pembukuan, hal ini dapat saja terjadi pada saat penyusunan Laporan Keuangan dan Pencatatan Barang



Milik Daerah oleh Perangkat Daerah untuk itu Badan Keuangan dan Aset Dearah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).
 - Melakukan Rekonsiliasi data pada entitas akuntansi secara berkala setiap bulannya.
- d. Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu, hal ini sangat mempengaruhi ketercapaian dari sasaran strategis ini. Ketepatan waktu pada laporan keuangan berdampak pada penilaian opini oleh BPK yang merupakan Indikator Kunci Utama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan antisipasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan melakukan hal berikut : menyusun SOP, melakukan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset seluruh OPD serta memberikan himbauan Sekretaris Daerah melalui Surat Edaran kepada seluruh OPD.
- e. Kesalahan dalam Penganggaran, Tim Anggaran Perangkat Daerah terdiri dari beberapa OPD untuk itu dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat guna mencegah terjadinya kesalahan penganggaran pada seluruh OPD. Adanya perubahan Peraturan dalam penyusunan Anggaran dan penggunaan Aplikasi berbasis elektronik juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penganggaran, untuk itu Badan keuangan dan Aset Daerah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan asistensi Dokumen Penganggaran oleh TAPD serta melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan juga sosialisasi guna meningkatkan kemampuan aparatur penyusun anggaran.

Pada Realisasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2022 berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan yang



telah ditetapkan. Serta pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Predikat WTP oleh BPK RI.

Foto Dokumentasi Pengesahan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2022



Bupati Deli Serdang Bapak H. Ashari Tambunan dan DPRD Deli Serdang Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang.



Bupati Deli Serdang Bapak H. Ashari Tambunan dan DPRD Deli Serdang Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P-APBD 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang.



Foto Dokumentasi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) oleh BPK RI Tahun 2021



Bupati Deli Serdang Bapak H. Achari menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Ketua Perwakilan BPK Sumatera Utara Bapak Eddy Dikta Panjaitan SE, MM dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

2. Untuk ketercapaian sasaran strategis Kualitas Pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset memiliki tujuan strategis Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adapun langkah yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan sarana media Informasi secara elektronik serta dengan cara meningkatkan kapasitas SDM melalui mengikutsertakan kegiatan Blmtek, Sosialisasi dan Pelatihan guna tercapainya Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal.

**3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Adapun penyajian efisiensi atau penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			%	Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100	573.031.867.067	547.058.101.866	97,47	97,47	4,53
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79	100	139.217.628.742	125.378.727.077	90,05	90,05	9,94
		MIALHE AKIP Perangkat Daerah	74	74	100	1.452.300	300.000	20,66	20,66	74,34

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :



Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	100		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2



				Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10,74	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



				Sosialisas Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57,80	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70,46	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran



				Penyediaan Barang dan Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Sebagai Dokumen Landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian Sasaran
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5,02	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

				Pengadaan Satana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48,05	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,68	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	79,08	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2



				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D rehabilitasi	5,83	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D rehabilitasi	42,06	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerbitan Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pertepatan penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu				
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan			Menukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1



				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	66,6 T	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



				Penunjang Urusan Kemungkinan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dikeksekusi			
				Analisis Perencanaan dan Penyakur Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dikeksekusi			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	SB, D C	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



				Optimalisasi Penggunaan, Pemantauan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan aset	50,00	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	





3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.219.081.042,00	125.379.027.022,00	90,06
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.452.300,00	300.000,00	20,66
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.772.118.510,00	7.542.706.574,00	86
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.073.467,00	26.240.000,00	38,55
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.809.117.303,00	1.104.445.463,00	61,05
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	311.876.434,00	97.147.600,00	31,15
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.087.245.308,00	115.906.036.301	91,20
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.197.720,00	702.151.084,00	60,05
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	570.220.014.508,00	546.056.413.388,00	95,76
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.261.937.256,00	1.252.747.900,00	55,38
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.301.389.069,00	1.015.450.800,00	78,03
2.3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	566.656.688.183,00	543.788.214.688,00	95,96
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.811.852.532,00	1.001.688.578,00	35,62
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.811.852.532,00	1.001.688.578,00	35,62



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) sasaran strategis tercapai dan secara keseluruhan keduanya tercapai pada Tahun 2022.
2. Faktor keberhasilan tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu adalah merupakan keberhasilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan APBD sehingga penyampaian tepat pada tahapannya dan juga keberhasilan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) bersama dengan Lembaga Legeslatif dalam pembahasan Anggaran dan



Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sehingga proses tahapannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertahankan dan memaksimalkan kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan menggunakan Aplikasi FMIS (*Financial Management Information System*) sebuah aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini menggantikan SIMDA Keuangan yang sebelumnya digunakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tentu dalam penggunaan aplikasi ini perlu adanya kesesuaian para Sumber Daya Aparatur dalam menggunakannya. Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan beberapa langkah sehingga pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien di seluruh Perangkat Daerah.
- b. Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Keuangan dan Aset menambah satu kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah hal ini merupakan Implementasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada kegiatan ini Badan Keuangan dan Aset Daerah akan mengoptimalkan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, penguatan Koordinasi ini juga dalam rangka membangun kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat mendorong atau memaksimalkan tercapainya Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah aset juga merupakan bagian Laporan Keuangan yang



harus disampaikan tentu optimalisasi langkah-langkah dalam hal Inventarisasi Aset, Pengamanan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan perlu dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga mendukung ketercapaian Indikator Kunci Utama Pemerintah Daerah dalam mendapatkan Opini WTP di Tahun berikutnya.

- d. Menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut mempertahankan dan memaksimalkan Kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**BAGINDA THOMAS HARAHAHAP, SH
PEMBINA**

NIP. 19730721 199503 1 003



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, beraparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **BAGWIDA THOMAS HARAHAP, SH**
Jabatan: **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: **ASHARI TAMBUNAN**
Jabatan: **BUPATI DELI SERDANG**

Sama-sama disebut pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2022

Pihak Kedua: 
ASHARI TAMBUNAN

Pihak Pertama: 
BAGWIDA THOMAS HARAHAP, SH
NIP. 19730721 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan daerah	Persentase pelaksanaan laporan keuangan MD APBD (Rp) Miliar/ tahun	100%
2	Memperkuat kualitas persiapan dan kerja anggaran daerah	Volume Pengajuan-Keperluan MD APBD (Rp) Miliar/ tahun	79 Poin 78 Poin

MD	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pergerakan Kinerja Daerah	Rp. 183.532.583.111,-	APBD
2	Pengelolaan Belanja MD Daerah	Rp. 2.911.950.792,-	APBD
3	Penyanggah Utusan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 136.953.432.573,-	APBD

Lubuk Pakam, 2022

BUPATI DELI SERDANG **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

ASHARI TAMBUNAN **BAGWIDA THOMAS HARAHAP, SH**
NIP. 19730721 199503 1 003



BERITA ACARA HASIL REVIU RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

BERITA ACARA HASIL REVIU RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 Nomor .. 056/149.....

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Bulan September Tahun 2020, Kami Tim Reviu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 (nama terlampir), telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, dimana berita acara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 (sebelum reviu), dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. Tujuan Renstra

a. Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan	Indikator
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	(tidak ada)

b. Rekomendasi Tim Reviu

Berdasarkan Penilaian pada Lembar Kerja Kerja Evaluasi ANIP, dibutuhkan adanya indikator tujuan dalam renstra Perangkat Daerah

c. Urutan Tujuan Setelah Reviu

Sebelum Reviu		Setelah Reviu	
Tujuan	Indikator	Tujuan	Indikator
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	(tidak ada)	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK

II. SASARAN (jika perangkat daerah melakukan reviu sasaran)

I. Sasaran Renstra

a. Sasaran Sebelum Reviu

Sasaran	Indikator
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu
Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran	Penyusunan APBD yang tepat waktu

b. Rekomendasi Tim Reviu

Berdasarkan Penilaian TIM AKIP Kabupaten Deli Serdang, perlu dilakukan perubahan sasaran perangkat daerah untuk sinkronisasi dengan sasaran dalam buku dokumen RMI



LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Berdasarkan hasil revisi tersebut di atas maka
Tabel Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Hasil Revisi Tahun 2020,
 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Target Kinerja Keuangan Pada Tahun				
						2020 WTP	2021 WTP	2022 WTP	2023 WTP	2024 WTP
1.	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan akuntabel	Open ERP								
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pemenuhan proporsitas, ketepatan anggaran dan APBD yang tepat waktu	1. Program pengalihan anggaran daerah 2. Program pengalihan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan rata-rata peringkat daerah WTP dan transparansi akuntabel	WTP Kabupaten Yasmengaji				77 poin	78 poin	74 poin	81 poin	81 poin
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai LRA APBD Perangkat Daerah	1. Program pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	73 poin	73 poin	74 poin	76 poin	76 poin
						78 poin	78 poin	78 poin	78 poin	78 poin

Delit, 14 Maret 2021

Tan Eddy Swarna
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 Kabupaten Deli Serdang
 Tahun 2020

- Kemua Tim : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang
- Anggota : Sekretaris
- Anggota : Manajer Program
- Anggota : Manajer Keuangan

Mengesah:
 Kepala Bappeda
 Kabupaten Deli Serdang

Dr. REMUS HARHOLAN PARDEDE, M.Si
 PENDETA UTAMA MUDA
 NP. 13660306 199201 1 004

